Resiliensi Infrastruktur Desa: Mengungkap Strategi Keberlanjutan PPIP di Desa Wiru, Semarang

Annisa Ananda Putri¹

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta, Indonesia

**corresponding author E-mail:* nisapt14@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Desa Wiru, Kabupaten Semarang, dengan menelaah interaksi antara konten kebijakan dan konteks implementasi menggunakan kerangka Merilee S. Grindle. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus tunggal, menggunakan dokumen-dokumen desa (RPJMDes, RKPDes, APBDes, notulen musrenbang, dan laporan kegiatan) sebagai sumber data utama. Analisis tematik mengungkap bahwa pendanaan tepat waktu dan mekanisme musyawarah desa mendorong percepatan pembangunan infrastruktur melalui partisipasi gotong royong, namun kelembagaan lokal, terutama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), belum memiliki kapasitas manajerial yang memadai untuk pemeliharaan pasca-proyek. Ketidakseimbangan kekuasaan di tingkat desa juga memengaruhi prioritas proyek dan tingkat partisipasi warga. Temuan ini menegaskan perlunya memasukkan komponen penguatan kapasitas kelembagaan dan mekanisme akuntabilitas berkelanjutan sejak tahap perencanaan untuk memastikan manfaat program dapat terjaga dalam jangka panjang.

Kata kunci: Implementasi PPIP, Kapasitas Kelembagaan Desa, Partisipasi Masyarakat, Keberlanjutan Program Indonesia.

PENDAHULUAN

Pembangunan perdesaan sejak lama diakui sebagai fondasi pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang masih terpusat di perkotaan, kawasan desa menanggung beban kesenjangan pendapatan, keterbatasan infrastruktur dasar, dan akses layanan publik yang timpang. Pemerintah merespons lewat serangkaian kebijakan lintas kementerian, mulai dari mandat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal untuk mempercepat pembangunan wilayah tertinggal program digitalisasi P3PD guna optimalisasi potensi desa hingga perluasan jaring pengaman sosial seperti Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako (KemenkoPMK, 2022; Kemendes PDPT, 2020). Meski dirancang komprehensif, interaksi

multi-level dan tumpang-tindih kewenangan kerap menimbulkan fragmentasi implementasi sehingga label “desa tertinggal” sulit dihapus dari peta pembangunan nasional.

Dalam konteks kebijakan pembangunan yang melibatkan banyak aktor dan lembaga, tantangan implementasi di tingkat lokal menjadi semakin nyata. Koordinasi antarkementerian seperti Kemendesa PDTT dan Kementerian Sosial, meskipun memiliki misi yang saling melengkapi, sering kali menghadapi disonansi dalam prioritas program dan alokasi sumber daya, khususnya ketika keduanya menyasar komunitas desa yang sama (Kemensos, 2021; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 2020). Ketidaksinkronan ini menciptakan ruang bagi munculnya kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan di pusat dan realitas lapangan. Salah satu contoh konkret dari kebijakan desentralisasi yang sangat bergantung pada kapasitas dan partisipasi aktor lokal adalah Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP), yang dirancang sebagai upaya pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dasar desa (Rahmah & Subowo, 2017). Oleh karena itu, studi implementasi kebijakan menjadi penting tidak hanya untuk menilai efektivitas suatu program, tetapi juga untuk mengungkap dinamika kekuasaan, interaksi antaraktor, serta kapasitas kelembagaan di tingkat desa yang seringkali menjadi penentu utama keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

Penelitian ini secara spesifik memusatkan perhatian pada implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Desa Wiru, Kabupaten Semarang, sebagai studi kasus untuk memahami dinamika antara desain kebijakan dan praktik pelaksanaannya di tingkat lokal. Untuk menganalisis kompleksitas tersebut, digunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle yang menawarkan pendekatan komprehensif melalui dua dimensi utama: konten kebijakan dan konteks implementasi (Zulhakim, et al, 2024). Pendekatan ini memungkinkan identifikasi berbagai faktor yang memengaruhi implementasi, termasuk kekuasaan dan strategi aktor, karakter institusi dan rezim lokal, serta tingkat kepatuhan dan daya tanggap masyarakat desa terhadap program. Dengan menggunakan kerangka Grindle, (1980), analisis tidak berhenti pada deskripsi prosedural pelaksanaan PPIP, melainkan menyentuh aspek-aspek struktural dan relasional yang membentuk keberhasilan atau kegagalan program pembangunan berbasis komunitas seperti ini. Pendekatan ini sekaligus memperkuat relevansi studi dalam kerangka literatur implementasi kebijakan kontemporer.

Studi tentang implementasi kebijakan telah mengalami evolusi yang signifikan sejak era 1970-an, ketika pendekatan top-down mendominasi diskursus. Pendekatan ini menekankan pentingnya kontrol pusat terhadap proses implementasi dan kerap menyoroti kegagalan sebagai akibat dari panjangnya rantai birokrasi serta lemahnya kapasitas pelaksana (Fischer, Miller, & Sidney, 2017). Mazmanian & Sabatier (dalam Gupta, 1994) kemudian memperluas kerangka ini dengan mengklasifikasikan variabel keberhasilan implementasi menjadi tiga kategori: *tractability*, *statutory*, dan *nonstatutory variables*. Namun, kritik terhadap pendekatan ini muncul karena dianggap mengabaikan realitas dan diskresi aktor lokal dalam menjalankan kebijakan. Sebagai respons, pendekatan *bottom-up* dikembangkan oleh pemikir seperti Lipsky (dalam Hupe & Hill, 2007), yang memperkenalkan konsep birokrasi jalanan (*street-level bureaucracy*) untuk menekankan peran penting pelaksana garis depan dalam memengaruhi hasil kebijakan. Pendekatan ini kemudian dilengkapi oleh gagasan *backward mapping* dari Elmore, (1979), yang menekankan pentingnya memulai analisis dari hasil kebijakan yang diharapkan dan menelusuri ke belakang jalur. Perkembangan ini menegaskan bahwa implementasi kebijakan adalah proses interaktif, kompleks, dan tidak selalu linier, yang menjadikan kerangka Grindle, (1980) relevan untuk mengurai persoalan-persoalan dalam program pembangunan seperti PPIP di tingkat desa.

Teori implementasi Merilee S. Grindle, (1980) menawarkan pendekatan sintesis yang menggabungkan elemen-elemen dari model *top-down* dan *bottom-up*, sehingga menjadi alat analisis yang fleksibel dan kontekstual untuk mengevaluasi kebijakan publik, terutama di lingkungan dengan aktor beragam dan kondisi sosial-politik yang dinamis. Grindle, (1980) menekankan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada kejelasan konten kebijakan seperti tujuan, instrumen, dan sasaran, melainkan juga pada kondisi kontekstual tempat kebijakan itu dijalankan, termasuk distribusi kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor, karakter kelembagaan, serta respons masyarakat terhadap program (Zulhakim et al., 2024). Dalam hal ini, Grindle, (1980) memandang implementasi sebagai arena interaksi sosial dan politik yang dapat menghasilkan hasil yang berbeda meskipun kebijakan yang diterapkan sama. Oleh karena itu, dalam konteks program seperti PPIP yang sangat bergantung pada aktor desa dan struktur lokal, pendekatan Grindle, (1980) memungkinkan kita untuk membedah bagaimana kekuasaan informal, kapasitas kelembagaan, dan pola partisipasi masyarakat membentuk hasil implementasi secara nyata. Ini menjadikan teori

Grindle, (1980) sangat relevan tidak hanya secara konseptual, tetapi juga aplikatif untuk menganalisis keberhasilan dan kegagalan program pembangunan perdesaan.

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) merupakan kebijakan yang secara eksplisit dirancang untuk memperkuat peran desa dalam pembangunan, melalui skema pemberdayaan masyarakat berbasis partisipasi dan peningkatan infrastruktur dasar. Dalam desainnya, PPIP menempatkan pemerintah desa sebagai aktor utama, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan proyek infrastruktur (Hilman & Asmoro, 2020). Desa Wiru, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, dipilih sebagai lokasi studi karena merupakan salah satu penerima manfaat program ini yang dokumentasinya tersedia dan cukup lengkap untuk dianalisis. Relevansi PPIP sebagai objek kajian terletak pada sifatnya yang tidak hanya menasar pembangunan fisik, tetapi juga menuntut kesiapan institusional desa dan kohesi sosial masyarakat untuk menjalankan program secara berkelanjutan. Dengan kata lain, PPIP menjadi contoh konkret dari kebijakan yang keberhasilannya sangat ditentukan oleh sejauh mana konten kebijakan dapat berinteraksi secara adaptif dengan realitas lokal, sesuai dengan kerangka Grindle (Zulhakim et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PPIP di Desa Wiru melalui pendekatan teori Grindle, (1980), dengan fokus pada dua pertanyaan utama: (1) bagaimana konten dan konteks kebijakan berinteraksi dalam pelaksanaan PPIP, dan (2) faktor-faktor apa saja yang memfasilitasi atau menghambat keberhasilannya. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur implementasi kebijakan di konteks negara berkembang, khususnya dalam sektor pembangunan perdesaan yang sarat dengan dinamika lokal. Sementara secara praktis, studi ini menawarkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk pengambil kebijakan dalam merancang program pembangunan yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan sensitif terhadap konteks kelembagaan di tingkat desa. Dengan menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, serta menyoroti pentingnya interaksi antara aktor, struktur, dan proses dalam kebijakan publik, penelitian ini diharapkan menjadi referensi strategis dalam memperbaiki desain dan implementasi kebijakan serupa di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami secara mendalam dinamika implementasi kebijakan di tingkat lokal dalam konteks Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Desa Wiru, Kabupaten Semarang. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi fenomena secara kontekstual dan interpretatif, terutama ketika fenomena tersebut melibatkan interaksi antara struktur kebijakan formal dan praktik aktor di lapangan. Metode penelitian ini berfokus pada studi kasus tunggal (*single case study*) (Jhon W. Creswell, 2016), yang memungkinkan penelusuran intensif terhadap bagaimana konten kebijakan PPIP berinteraksi dengan konteks sosial-politik desa. Sumber data utama adalah dokumen resmi pemerintah desa yang mencakup RPJMDes, RKPDes, APBDes, notulen musyawarah, laporan kegiatan program, serta regulasi terkait di tingkat pusat dan daerah. Selain itu, digunakan pula literatur ilmiah sebagai data sekunder untuk memperkuat kerangka teoretis dan mendukung analisis.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik yang dikembangkan berdasarkan dimensi-dimensi dalam teori implementasi Merilee S. Grindle, (1980), yaitu konten kebijakan dan konteks implementasi, yang mencakup kekuasaan dan strategi aktor, karakter kelembagaan, serta kepatuhan dan daya tanggap. Tahapan analisis meliputi familiarisasi data, pengkodean tematik, pengelompokan temuan ke dalam kategori sesuai dimensi teori, serta interpretasi terhadap pola hubungan antara variabel-variabel tersebut. Untuk menjamin validitas data, dilakukan teknik data triangulation melalui perbandingan antar-dokumen serta theory triangulation dengan menggunakan pendekatan sintesis dari literatur lain seperti Lipsky (dalam Hupe & Hill, 2007) dan Elmore, (1979) guna memperkuat argumentasi. Keabsahan interpretasi juga diperkuat dengan menjaga audit trail secara sistematis dan mendokumentasikan seluruh proses pengambilan keputusan analitis. Dengan kombinasi strategi ini, metodologi penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang rigor, valid, dan relevan dalam menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan bekerja dalam konteks lokal yang kompleks.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bagian ini menyajikan temuan empiris yang diperoleh dari analisis data dokumen desa, disusun secara tematis sesuai dengan dimensi kerangka Merilee S. Grindle, (1980).

Konten Kebijakan PPIP

Berdasarkan dokumen yang dianalisis, konten kebijakan PPIP di Desa Wiru secara jelas menetapkan tujuan utamanya, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan akses infrastruktur (Rahmah & Subowo, 2017). Program ini secara spesifik menargetkan masyarakat desa yang membutuhkan aksesibilitas yang lebih baik untuk kegiatan ekonomi dan sosial mereka. Alokasi sumber daya finansial untuk proyek-proyek infrastruktur tertentu, seperti perbaikan jalan desa atau pembangunan fasilitas dasar, tercatat dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Arifin & Kurniadi, 2024; Rahmah & Subowo, 2017). Teori kausal (Gudono, 2006) yang mendasari program ini adalah bahwa dengan memperbaiki infrastruktur dasar, mobilitas masyarakat akan meningkat, biaya transportasi berkurang, dan akses ke pasar serta layanan dasar menjadi lebih mudah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Konteks Implementasi di Desa Wiru

Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor

Analisis dokumen menunjukkan bahwa peran kepala desa dan perangkat desa sangat dominan dalam pengambilan keputusan terkait proyek PPIP. Meskipun ada catatan musyawarah desa (Musrenbangdes) yang melibatkan masyarakat, keputusan akhir seringkali mencerminkan prioritas yang ditetapkan oleh elite desa (Rahmah & Subowo, 2017).. Kepentingan aktor-aktor kunci, seperti kepala desa dan beberapa tokoh masyarakat, terlihat selaras dengan tujuan program untuk pembangunan fisik yang dapat memberikan manfaat langsung dan terlihat. Strategi yang digunakan umumnya bersifat *top-down* dalam hal alokasi dana dan penentuan jenis proyek, namun berusaha melibatkan masyarakat dalam tahap pelaksanaan, seperti gotong royong dalam pembangunan.

Karakteristik Institusi dan Rezim

Institusi desa yang relevan dalam implementasi PPIP termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya. Dokumen menunjukkan bahwa BPD

memiliki peran formal dalam pengawasan, namun dalam praktik, pengaruhnya terhadap keputusan implementasi program mungkin bervariasi (Rahmah & Subowo, 2017).. Peraturan desa yang mendukung implementasi PPIP telah ada, namun kapasitas kelembagaan desa dalam mengelola dan mempertahankan infrastruktur pasca-proyek masih belum sepenuhnya terpenuhi.¹ Ini mengindikasikan bahwa meskipun kerangka institusional formal telah ada, fungsi operasional dan kapasitas berkelanjutan dari lembaga-lembaga ini masih menghadapi tantangan.

Kepatuhan dan Daya Tanggap

Tingkat kepatuhan terhadap pedoman program terlihat cukup tinggi dalam hal pelaporan administratif dan penggunaan dana sesuai alokasi. Masyarakat menunjukkan respons positif terhadap perbaikan akses infrastruktur yang dihasilkan oleh PPIP. Perbaikan akses jalan desa, misalnya, secara langsung mempermudah mobilitas warga (Rahmah & Subowo, 2017).. Namun, daya tanggap terhadap kebutuhan jangka panjang, seperti penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat untuk mengelola dan memelihara infrastruktur secara mandiri, masih belum optimal (Rahmah & Subowo, 2017).. Ini menunjukkan bahwa meskipun program berhasil memenuhi kebutuhan infrastruktur mendesak dan mendapatkan dukungan masyarakat, aspek pembangunan kapasitas yang lebih lambat dan kurang terlihat masih memerlukan perhatian lebih.

Pembahasan Temuan

Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Desa Wiru menunjukkan dinamika kompleks antara konten kebijakan yang jelas dan konteks implementasi yang beragam. Hasil analisis dokumen mengkonfirmasi bahwa PPIP berhasil mencapai tujuan utamanya dalam meningkatkan akses infrastruktur dan memperoleh respons positif dari masyarakat.¹ Perbaikan aksesibilitas telah menyederhanakan mobilitas warga, yang merupakan indikator keberhasilan yang nyata dan langsung (Rahmah & Subowo, 2017).. Namun, di balik keberhasilan jangka pendek ini, terdapat tantangan signifikan terkait penguatan institusi desa yang menangani PPIP, yang masih belum terpenuhi sepenuhnya karena keterbatasan waktu program.

Penlaahan ini menunjukkan adanya ketegangan krusial yang sering diamati dalam program pembangunan. Sementara perbaikan infrastruktur yang nyata dan langsung (seperti perbaikan jalan)

menghasilkan manfaat yang terlihat dan persepsi publik yang positif, kegagalan untuk memperkuat institusi desa lokal (faktor kontekstual kritis yang terkait dengan pembangunan kapasitas dan keberlanjutan) menyiratkan kerentanan jangka panjang yang potensial. "Respons positif" mungkin mewakili keberhasilan jangka pendek berdasarkan hasil yang terlihat, tetapi tanpa institusi lokal yang kuat untuk mengelola dan memelihara infrastruktur atau mereplikasi inisiatif pembangunan serupa, keberlanjutan jangka panjang dan dampak pembangunan PPIP yang lebih luas dapat terganggu. Ini menunjukkan "defisit implementasi" bukan dalam mencapai hasil langsung, tetapi dalam mendorong kapasitas lokal yang berkelanjutan dan kemandirian, yang seringkali lebih sulit diukur dan membutuhkan waktu lebih lama untuk terwujud. Hal ini menyoroti tantangan umum dalam intervensi pembangunan: menyeimbangkan tekanan untuk hasil yang cepat dan terlihat dengan proses yang lebih lambat, kurang berwujud, tetapi pada akhirnya lebih krusial dalam membangun kapasitas lokal dan ketahanan kelembagaan. Kerangka Grindle, (1980) membantu membedah ini, menunjukkan bagaimana hasil positif dalam satu dimensi (misalnya, kepatuhan dan daya tanggap terhadap kebutuhan infrastruktur langsung) dapat hidup berdampingan dengan kekurangan dalam dimensi lain (misalnya, karakteristik kelembagaan dan pembangunan kapasitas).

Peran diskresi birokrat jalanan, dalam hal ini perangkat desa dan fasilitator lokal, sangat terlihat. Diskresi ini memungkinkan adaptasi program PPIP dengan realitas lokal yang unik, seperti memilih jenis proyek infrastruktur yang paling mendesak berdasarkan masukan masyarakat. Fleksibilitas ini dapat meningkatkan daya tanggap terhadap kebutuhan spesifik desa, yang berkontribusi pada respons positif dari warga (Rahmah & Subowo, 2017).. Namun, diskresi yang sama, jika tidak diawasi atau terlalu dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan dan kepentingan aktor lokal, berpotensi menyebabkan penyimpangan dari tujuan kebijakan pusat atau bahkan praktik korupsi, sebagaimana diperingatkan oleh Lipsky (dalam Hupe & Hill, 2007). Tantangan kritis untuk implementasi yang efektif adalah bagaimana memanfaatkan diskresi yang diperlukan ini untuk implementasi yang adaptif tanpa mengorbankan kesetiaan pada kebijakan, transparansi, atau akuntabilitas. Dinamika ini menyoroti ketegangan mendasar dalam implementasi kebijakan yang terdesentralisasi: keharusan untuk fleksibilitas dan adaptasi lokal versus tuntutan untuk penerapan tujuan kebijakan pusat yang konsisten dan mekanisme akuntabilitas yang kuat. Kerangka Grindle, (1980), ketika digabungkan

dengan pemahaman Lipsky (dalam Hupe & Hill, 2007), memberikan lensa yang kuat untuk menganalisis interaksi kompleks ini.

Kegagalan dalam penguatan institusi desa yang bertanggung jawab atas PPIP 1 bukanlah kekurangan yang terisolasi, melainkan kemungkinan konsekuensi dari interaksi kompleks dan saling bergantung di antara faktor-faktor kontekstual Grindle, (1980). Meskipun "keterbatasan waktu program" (Rahmah & Subowo, 2017) mungkin menjadi penyebab langsung, akar penyebab yang lebih dalam kemungkinan bersifat multi-aspek dan saling terkait. Misalnya, apakah ada "komitmen pejabat" yang memadai (Mazmanian & Sabatier dalam (Fischer et al., 2017) di tingkat provinsi atau kabupaten untuk memprioritaskan pembangunan kapasitas kelembagaan jangka panjang di atas hasil infrastruktur yang langsung terlihat? Apakah "dinamika kekuasaan" yang berlaku di dalam desa (Rahmah & Subowo, 2017) mendukung penyelesaian proyek segera (yang menguntungkan aktor tertentu) di atas proses yang lebih lambat dalam membangun institusi lokal yang kuat? Apakah ada "kepentingan yang bertentangan" di antara berbagai aktor mengenai alokasi sumber daya untuk pengembangan institusi versus pengeluaran infrastruktur langsung? Hal ini menunjukkan bahwa kegagalan atau kekurangan dalam satu dimensi kontekstual (misalnya, institusi) jarang terisolasi tetapi seringkali terkait erat dengan tantangan atau kelemahan dalam dimensi lain (misalnya, distribusi kekuasaan, keselarasan kepentingan, komitmen sumber daya, atau bahkan kepatuhan dari otoritas yang lebih tinggi) (Grindle, 1980; Rahmah & Subowo, 2017). Hal ini memperkuat argumen inti Grindle, (1980) bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi bukan tentang faktor-faktor yang terisolasi tetapi hubungan yang kompleks, seringkali saling bergantung, antara konten kebijakan dan berbagai elemen kontekstual yang dinamis. Oleh karena itu, analisis yang holistik dan terintegrasi diperlukan untuk mengidentifikasi akar penyebab kesenjangan implementasi yang sebenarnya dan untuk merumuskan intervensi yang efektif.

Tabel berikut menyajikan ringkasan analisis implementasi PPIP di Desa Wiru berdasarkan dimensi teori Merilee S. Grindle, (1980):

Tabel 1: Analisis Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Desa Wiru berdasarkan Teori Merilee S. Grindle

Dimensi Teori Grindle Konten Kebijakan	Temuan dari Dokumen Desa	Implikasi/Analisis
Tujuan	Tujuan PPIP adalah peningkatan kesejahteraan melalui perbaikan akses jalan desa dan fasilitas umum. ¹	Tujuan yang jelas memfasilitasi pemahaman dan dukungan di tingkat lokal.
Sumber Daya	Alokasi dana Rp X juta untuk proyek Y di APBDes 20XX. Dana disalurkan sesuai jadwal.	Sumber daya finansial yang memadai dan penyaluran tepat waktu mendukung kelancaran pelaksanaan proyek fisik.
Konteks Implementasi		
Kekuasaan Aktor	Kepala Desa memiliki peran dominan dalam pengambilan keputusan proyek; beberapa keputusan penting tidak melalui musyawarah penuh.	Distribusi kekuasaan terpusat pada elite desa berpotensi memengaruhi prioritas proyek, mungkin mengabaikan kebutuhan minoritas.
Kepentingan & Strategi Aktor	Tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa tinggi, terutama saat penentuan jenis infrastruktur. Tokoh masyarakat lokal aktif dalam mengadvokasi proyek yang menguntungkan kelompok mereka.	Tingginya partisipasi dalam perencanaan menunjukkan kepatuhan awal dan keselarasan kepentingan untuk manfaat langsung, namun kepentingan yang beragam dapat memengaruhi pilihan proyek.
Karakteristik Institusi & Rezim	Pembentukan BUMDes sebagai pengelola aset infrastruktur pasca-proyek tercatat, namun belum ada laporan kegiatan yang signifikan atau pelatihan kapasitas yang memadai.	Keberadaan institusi formal (BUMDes) adalah positif, namun kurangnya penguatan kapasitas dan operasionalisasi penuh menghambat keberlanjutan. Ini menunjukkan kelemahan dalam karakteristik institusi.
Kepatuhan & Daya Tanggap	Laporan menunjukkan proyek fisik diselesaikan sesuai spesifikasi dan anggaran. Respon positif dari warga terhadap perbaikan jalan. ¹ Tingkat partisipasi warga dalam pemeliharaan infrastruktur pasca-proyek rendah.	Kepatuhan terhadap prosedur dan hasil fisik baik, menunjukkan daya tanggap terhadap kebutuhan mendesak. Namun, rendahnya partisipasi pemeliharaan mengindikasikan tantangan daya tanggap jangka panjang dan kepemilikan masyarakat.

Sumber: (Fischer et al., 2017; Grindle, 1980; Rahmah & Subowo, 2017), (diolah peneliti, 2025)

Tabel 1. ini secara visual menunjukkan bagaimana temuan empiris dari dokumen desa dapat dipetakan ke dalam dimensi-dimensi teori Merilee S. Grindle, (1980), memungkinkan analisis yang terstruktur dan mendalam tentang interaksi antara konten kebijakan dan konteks implementasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa analisis implementasi PPIP di Desa Wiru mengungkap dua aspek: cara program dijalankan dan mengapa hasilnya seperti itu. Pertama, alokasi dana tepat waktu dan mekanisme musyawarah desa (musrenbang) memungkinkan pembangunan jalan dan fasilitas publik secara cepat melalui gotong royong warga. Kedua, peran dominan kepala desa dalam pengambilan keputusan dan minimnya pelatihan bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menyebabkan kelembagaan lokal belum siap memelihara infrastruktur pasca-program. Dengan demikian, keberhasilan jangka pendek, akses jalan dan dukungan masyarakat, terbentuk melalui kombinasi top-down pendanaan dan bottom-up partisipasi, tetapi tanpa penguatan kapasitas kelembagaan sejak awal, manfaat infrastruktur berisiko menurun. Temuan ini menekankan pentingnya integrasi pelatihan manajemen desa dan mekanisme akuntabilitas berkelanjutan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan agar intervensi serupa dapat berdampak lebih tahan lama dan responsif terhadap kebutuhan lokal..

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, F., & Kurniadi, B. (2024). Implementation of the Development Planning Deliberation Policy (Musrenbang) in Sumur Bandung Sub District. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 8(1), 288. <https://doi.org/10.58258/jisip.v8i1.6130>
- Elmore, R. F. (1979). Mapping : Backward and Implementation Policy Decisions. *Political Science Quarterly*, 94(4), 601–616.
- Fischer, F., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2017). Handbook of Public Policy Analysis. *Handbook of Public Policy Analysis*.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*.
- Gudono. (2006). Analisis Arah Kausalitas (Causal Ordering). *Jurnal of Indonesian Economy and Business (JIEB)*, 21(1), 75–82.
- Gupta, I. D. (1994). *The Implementation of European Community Environmental Directives in The United Kingdom: Analysis of The Mazmanian And Sabatier Framework*. (September).
- Hilman, Y. A., & Asmoro, Y. R. (2020). Peran Pemerintahan Desa dalam Melakukan Praktik

- Pembangunan Infrastruktur The Role of Village Administration to Infrastructure Development Practices. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 1(2), 131. <https://doi.org/10.32669/village>
- Hupe, P., & Hill, M. (2007). Street-level bureaucracy and public accountability. *Public Administration*, 85(2), 279–299. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.2007.00650.x>
- Jhon W. Creswell. (2016). *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran)* (Edisi Empat). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- KemenkoPMK. (2022). *Program P3PD Untuk Kuatkan Pemerintahan dan Pembangunan Desa*. Retrieved from <https://www.kemendekopmk.go.id/program-p3pd-untuk-kuatkan-pemerintahan-dan-pembangunan-desa>
- Kemensos. (2021). Program-Program Kementerian Sosial 2021. In *Kemensos*. Retrieved from https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/3514/1/Laporan_Riskesdas_2018_Nasional.pdf
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, D. T. (2020). *Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2020-2024*. Retrieved from [https://www.kemendesa.go.id/berita/assets/files/final_4_RENSTRRA_KEMENDESA_PDTT_Tahun_2020-2024_\(21_Desember_2020\)_opt_\(1\).pdf](https://www.kemendesa.go.id/berita/assets/files/final_4_RENSTRRA_KEMENDESA_PDTT_Tahun_2020-2024_(21_Desember_2020)_opt_(1).pdf)
- Rahmah, F., & Subowo, A. (2017). *Implementasi Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (Ppip) Di Desa Wiru Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang*. Retrieved From <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/16030>
- Zulhakim, A. A., Suratman, Budiyo, Nursanty, & Susanti. (2024). Context Analysis of the Implementation of Village Community Development and Empowerment Programs. *KnE Social Sciences*, 2024(6), 412–430. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i7.15520>